

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan agenda wajib yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (Tamianingsih & Eprilianto, 2020). Pembangunan nasional juga menjadi upaya dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang mencakup upaya pengembangan kegiatan perekonomian. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia untuk seluruh masyarakat serta dapat dirasakan sebagai perbaikan taraf hidup sesuai dengan cita- cita kemerdekaan bangsa Indonesia (Romli, 2017).

Dalam pembangunan nasional hal yang terpenting yakni pembangunan desa, dikarenakan mayoritas wilayah Indonesia terdiri dari pedesaan, serta desa juga memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional (Ariadi, 2019). Adapun jumlah desa pada tahun 2023 yang ada di Indonesia berdasarkan jumlah provinsi yakni 38 provinsi dengan jumlah desa yang dimiliki sebanyak 83.763 desa. Adapun daftar desa di Indonesia menurut sumber dari nomor.net sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2023

No	Nama Provinsi	Jumlah Desa
1	Aceh	6.500
2	Sumatera Utara	6.110
3	Sumatera Barat	1.265
4	Sumatera Selatan	3.258
5	Riau	1.862
6	Jambi	1.585
7	Bengkulu	1.513
8	Lampung	2.651
9	Bangka Belitung	393
10	Kepulauan Riau	419
11	Jawa Barat	5.957
12	Jawa Tengah	8.563
13	DIY Yogyakarta	438
14	Jawa Timur	8.494
15	DKI Jakarta	267
16	Banten	1.558
17	Bali	716
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	1.166
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	3.442
20	Kalimantan Timur	1.038
21	Kalimantan Barat	2.145
22	Kalimantan Utara	482
23	Kalimantan Selatan	2.016
24	Kalimantan Tengah	1.571
25	Sulawesi Tengah	2.071
26	Sulawesi Utara	1.839
27	Sulawesi Selatan	3.059
28	Sulawesi Barat	648
29	Sulawesi Tenggara	2.287
30	Gorontalo	729
31	Maluku	1.235
32	Maluku Utara	1.185
33	Papua	999
34	Papua Barat	824
35	Papua Barat Daya	1.013
36	Papua Selatan	690
37	Papua Tengah	1.208
38	Papua Pegunungan	2.6277
Total		83.763

Sumber: https://m.nomor.net/_kodepos

Dengan adanya data diatas menunjukkan bahwa disetiap provinsi mayoritas terdapat pedesaan, maka dalam mencapai tujuan pembangunan di Indonesia, pemerintah memiliki peranan penting untuk memberikan kebijakan atau program yang dapat mewujudkan dan menunjang kesejahteraan masyarakat (Sari & Tukiman, 2023).

Namun pembangunan yang dilakukan di Indonesia masih belum merata dan juga belum maksimal, dikarenakan jumlah angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang meningkat, khususnya di daerah pedesaan (Cahyaningrum & Tukiman, 2022). Berdasarkan data laporan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada bulan maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458. Di pedesaan persentase penduduk miskin yakni 12,22% sedangkan di perkotaan presentase penduduk miskin 7,29%. Jika dibandingkan antara angka kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan maka jumlah kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Dengan demikian untuk mensejahterakan masyarakat serta mengoptimalkan pembangunan di Indonesia, pemerintah berupaya memberikan kewenangan bagi desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa sebagai usaha desa baik dari segi ketahanan pangan ataupun tempat wisata (Sari & Tukiman, 2023).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

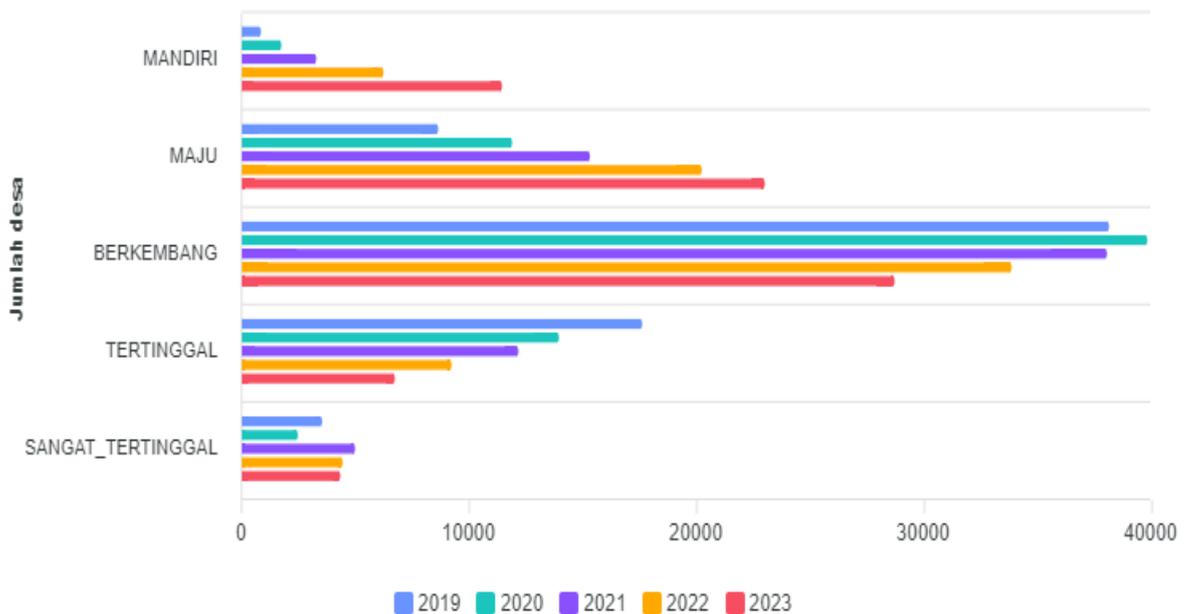
hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ariadi, 2019).

Desa memiliki berbagai tingkatan sesuai dengan kemajuan serta perkembangannya. Desa dapat dikatakan maju ketika desa tersebut mampu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi desa itu sendiri. Dalam perkembangannya desa dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yakni Desa swasembada yang biasanya disebut sebagai maju atau berkembang. Untuk inisiatif pembangunan desa, masyarakat desa juga telah mampu memanfaatkan dan memperluas sumber daya yang sudah ada. Selain itu, adat istiadat tidak lagi mengikat masyarakat. Serta pemikiran dari masyarakat desa swasembada juga sudah modern.

Kemudian yakni Desa Swakarya atau desa peralihan (transisi) dari desa yang belum maju (swadaya) ke desa yang sudah maju (swasembada). Desa ini sedang berada dalam tahap pengembangan serta mampu meningkatkan perekonomian dengan adanya sarana yang ada. Masyarakatnya juga tidak terikat dengan adat istiadat secara penuh. Dan juga lapangan pekerjaan sudah beragam.

Dan yang terakhir adalah Desa Swadaya yang disebut dengan desa tertinggal. Hal ini dikarenakan pola pemikiran masyarakat yang primitif dan tertutup sehingga terikat dengan adat istiadat yang masih menjadi kepercayaan masyarakat. Teknologi yang ada juga masih rendah bahkan belum ada serta sarana prasarana yang ada juga masih terbilang kurang. Dikutip dari sumber <http://pagerdawang.desa.id/kabardetail/enVEZmZrQnlpWkVYTHlrZlp3YmlOUT09/klasifikasi-desa-berdasarkan-perkembangannya.html>

Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019-2023, Indonesia memiliki status terbanyak pada desa berkembang. Data IDM ini dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1. 1 Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia Tahun 2019-2023
Sumber: <https://idm.kemendes.go.id/>

Pada gambar Indeks Desa Membangun (IDM) diatas menunjukkan bahwa tahun 2019-2022 pada kategori Desa Mandiri, Desa Maju, dan Desa Berkembang mengalami peningkatan. Namun 2023 jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakni Luthfy Latief sebagai berikut:

Kontan.co.id: Luthfy menerangkan bahwa berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, terdapat 623 desa tergolong mandiri, 20.249 desa maju, dan 33902 desa berkembang, 9.584 desa tertinggal serta terdapat 4.982 desa sangat tertinggal. Sementara pada tahun 2023 tercatat 11.456 desa telah mandiri, 23.035 desa maju, 28.766 desa berkembang, dan desa tertinggal yang tadinya sekitar 9.000 an desa (IDM tahun 2022), sekarang sisa 7.154 desa

dan desa sangat tertinggal 4.850 desa. Tren jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya dampak dana desa yang dimana belum maksimalnya pada tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-2023-masih-ada-4850-desa-tergolong-sangat-tertinggal> Diakses pada Senin 4 September 2023.

Untuk itu adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga peningkatan desa serta meminimalisir terjadi permasalahan terkait penggunaan dana desa yakni dengan bekerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pembangunan perekonomian di desa melalui kewirausahaan desa. Kewirausahaan desa ini dapat diwujudkan serta diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)¹ (Kumala, 2022). Dalam upaya mendongkrak perekonomian desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Didirikan berdasarkan kebutuhan desa dan potensi desa yang dimiliki. (Nur Yamin, 2021).

Dengan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh desa diharapkan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Aturan terkait keberlanjutan mengenai BUM Desa diatur pada Peraturan Daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Desa saat ini di Indonesia terdapat 50.316 BUM Desa dan 5.217 BUM Desa Bersama dan total keseluruhan BUM Desa secara nasional adalah 55.533 BUM Desa. Dikutip dari sumber <https://bumdes.kemendes.go.id/>

Adapun BUM Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

¹ Sebutan untuk Badan Usaha Milik Desa menurut undang-undang adalah BUM Desa namun masyarakat sering menyebut dengan sebutan BUMDes

tentang pendirian, pengelolaan, pengembangan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pengelolaan BUM Desa dilaksanakan oleh masyarakat desa, dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Dengan adanya BUM Desa dapat juga berfungsi untuk menampung kegiatan ekonomi dan kemandirian masyarakat dalam mengelola usaha atau bisnis yang dikembangkan oleh BUM Desa (Rahayu & Febrina, 2021). Selain itu, kehadiran BUM Desa diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal dengan mendorong pertumbuhan usaha yang sedang dilaksanakan (Karmila et al., 2022)

Adapun jumlah BUM Desa di Jawa timur dijelaskan oleh Bapak Budi Sarwoto, Ketua PMDP Jawa Timur:

Caritau.com: mengatakan bahwa terdapat 7.721 desa di provinsi ini saat ini. Dari jumlah tersebut, 6.490 desa memiliki BUM Desa, dengan 1.400 BUM Desa dengan status maju, 2.353 BUM Desa berstatus berkembang, 2.737 BUM Desa berstatus pemula atau masih menjalani tahap registrasi. Perkembangan BUM Desa di Jawa Timur sendiri tidak lepas dari pendampingan, pemberian bantuan serta penyuluhan dari pihak pemerintah dan pihak lainnya dalam mendorong pengelolaan BUM Desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Sumber: <https://caritau.com/post/gerakkan-ekonomi-desa-bank-umkm-bersinergi-pemprov-jatim-dan-ojk-berdayakan-bumdes-dan-bumdesma>
Diakses Pada Senin, 27 Feb 2023

Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Bank UMKM Jatim dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, saling bersinergi untuk meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa/BUM DesMa). Dijelaskan Direktur Utama Bank UMKM Jatim pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUM Desa/DesMa BUM Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa melalui Bank UMKM Jatim, di Hotel Mercure Grand Mirrama Surabaya, yaitu:

Harianbhirawa.co.id: Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara DPMD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Bank UMKM Jatim mengenai sinergi program pemberdayaan masyarakat dan desa. Tujuannya jelas dalam konteks peringatan ekonomi bagi masyarakat desa. Bank UMKM Rahang Timur tidak mungkin keluar dari desa karena banyak UMKM di desa tersebut. Karena potensi yang besar tersebut, Bank UMKM Jatim tidak ingin hanya menjadi penonton saja. Untuk itu acara penandatanganan ini dilaksanakan pada awal tahun agar kedepannya dapat berjalan maksimal. Selama ini Bank UMKM tidak hanya memberikan bantuan pendanaan kepada UMKM. “Tetapi juga mencari pasar, mencari outbond link, termasuk ke luar pulau dan luar provinsi.” Ucap Pak Yudi selaku Direktur Utama Bank UMKM Jatim.

Sumber: <https://www.harianbhirawa.co.id/bank-umkm-jatim-dan-dpmd-bersinergi-tingkatkan-pemberdayaan-bumdes-bumdesma/> diakses pada 23 Februari 2023.

Dari penjelasan diatas bahwasannya pendirian BUM Desa di Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi desa yang ada (Adawiyah, 2018). Untuk menunjang berjalannya BUM Desa diperlukan strategi dalam pengembangan serta keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa. Sehingga dalam perkembangan BUM Desa di Jawa Timur diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat dan juga mempercepat penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur melalui usaha program BUM Desa (Ariadi & Sudarso, 2020).

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yakni Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang telah mencapai seratus persen Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Penghargaan ini diberikan oleh Bapak Dr. Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd selaku Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal,

dan Transmigrasi (PD TT) Republik Indonesia, hal itu sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Nusantarapos.co.id yaitu sebagai berikut:

Nusantara.co.id: Penghargaan diserahkan dalam puncak acara pesta rakyat pada Hari BUM Desa yang diselenggarakan di Halaman Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kementerian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tidak hanya memfasilitasi teknis administratif BUM Desa melainkan juga mendampingi hingga melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa.

Sumber: <https://nusantarapos.co.id/111048/transformasi-bumdes-capai-100-jombang-terima-penghargaan-dari-mendes/> Diakses pada Jumat 3 Februari 2023

Di Kabupaten Jombang terdapat 401 BUM Desa yang tersebar di setiap wilayah dari desa dan kelurahan tersebut. Dengan adanya penghargaan tercapainya seratus persen Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa di Kabupaten Jombang Di Kabupaten Jombang, juga meningkatkan jumlah Desa Mandiri seiring dengan tersebarnya BUM Desa di desa dan kelurahan.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bupati Jombang yakni Ibu Mundjidah Wahab dalam acara penyerahan Lencana Bhakti Desa Madya dan Lencana Desa Mandiri yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Jombang.

Jombangkab.go.id: bahwa menurut data Indeks Desa Berkembang (IDM) tahun 2023, desa mandiri di Kabupaten Jombang yang semula berjumlah 176 desa menjadi 211 desa, dan desa berkembang yang semula berjumlah 79 kini dinyatakan sudah tidak ada lagi. Keberhasilan peningkatan status desa ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Pemerintah Desa yang dilandasi oleh visi dan misi Kabupaten Jombang yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Masyarakat, Potensi Unggulan Lokal dan Industri” yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan desa dengan mendukung Indeks Pembangunan Desa (IDM).

Sumber: <https://jombangkab.go.id/berita/bupati-jombang-menerima-lencana-bhakti-desa-madya-dan-45-kades-menerima-lencana-desa-mandiri-> Diakses pada Kamis 14 September 2023.

Dengan keberhasilan yang diraih Kabupaten Jombang sebagai desa mandiri dan perkembangan BUM Desa yang ada diharapkan juga dapat meningkatkan keberdayaan desa sesuai dengan tujuan dari visi misi Kabupaten Jombang. Kemudian dalam pembentukan dan pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang, yakni Kecamatan Mojoagung terletak di antara perbatasan Kota Jombang dan Kota Mojokerto. Kecamatan Mojoagung menjadi kecamatan percontohan pada percepatan perekonomian dan juga terkait manajemen organisasi serta pelayanan publik. Hal tersebut diperoleh dari Radarjombang.jawapos.com yaitu sebagai berikut:

Radarjombang.jawapos.com: Pada tahun 2022, Kabupaten Mojoagung mendapatkan penghargaan dari Bupati Jombang Mundjidah Wahab selaku penyelenggara pelayanan publik kelompok pelayanan kecamatan dengan kategori sangat berkualitas. Selain itu juga terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui instansi terkait dan pemerintah desa.

Sumber: <https://radarjombang.jawapos.com/tokoh/663038511/camat-mojoagung-muchtartingkatkan-layanan-publik-tumbuhkan-perekonomian-masyarakat> diakses pada 3 Oktober 2023

Kecamatan Mojoagung terdiri dari 18 desa, dan setiap desa terbagi dalam beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Masyarakat (RW). Berikut data dusun, RT, dan RW Kecamatan Mojoagung:

Tabel 1. 2 Jumlah Dusun, RT dan RW di Kecamatan Mojoagung

Desa / Kelurahan	Dusun	RW	RT
Kedunglumpang	4	10	25
Dukuh Mojo	5	8	35
Karangwinongan	4	7	14
Kademangan	3	6	26
Janti	3	3	16
Tejo	5	5	15
Gambiran	3	6	18
Kauman	1	2	10
Mojotrisno	3	8	31
Tanggalrejo	6	8	35
Dukuhdimoro	3	9	27
Miagan	2	3	25
Mancilan	4	7	28
Betek	3	6	26
Karobelah	3	6	28
Murukan	2	4	21
Johowinong	5	12	32
Seketi	1	2	5
Jumlah	60	112	409

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2023

Berdasarkan data desa yang ada di Kecamatan Mojoagung, setiap desa sudah memiliki BUM Desa baik berstatus maju, pemula ataupun berkembang. Adapun data BUM Desa di Kecamatan Mojoagung yang di kutip dari datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data BUM Desa Se-Kecamatan Mojoagung

No	Desa/Kelurahan	Nama BUM Desa	Tahun Berdiri	Kategori
1	Kedunglumpang	Karya Abadi	2015	Maju
2	Dukuh Mojo	Desa Maju Jaya	2015	Berkembang
3	Karangwinongan	Lentera Jaya	2015	Maju
4	Kademangan	Al Amanah	2015	Berkembang
5	Janti	Janti Makmur	2015	Berkembang
6	Tejo	Pelita Harapan Sejahtera	2015	Berkembang
7	Gambiran	Gambiran Sejahtera	2015	Berkembang
8	Kauman	Kauman Madani	2015	Pemula
9	Mojotrisno	Trisno Sejahtera	2015	Berkembang
10	Tanggalrejo	Rejo Mulyo	2015	Berkembang
11	Dukuhdimoro	Sakura	2015	Maju
12	Miagan	Kreto Makmur	2015	Maju
13	Mancilan	Jati Mulyo	2021	Maju
14	Betek	Betek Bangkit Mandiri	2015	Berkembang
15	Karobelah	Makmur Jaya	2015	Berkembang
16	Murukan	Langgeng Jaya	2015	Berkembang
17	Johowinong	Johowinong Makmur	2015	Pemula
18	Seketi	Seketi Makmur	2015	Maju

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.3 data BUM Desa Se- Kecamatan Mojoagung, hampir semua desa memiliki status BUM Desa berkembang. Kemudian disusul dengan BUM Desa yang berstatus maju dan pemula. Kebanyakan BUM Desa di Kecamatan Mojoagung berdiri sejak tahun 2015 sejak diturunkannya undang - undang terkait pembentukan BUM Desa. Namun dengan lama berdirinya BUM

Desa juga tidak memungkinkan untuk dapat mewujudkan desa mandiri dan memajukan perekonomian desa. Namun pada BUM Desa yang sudah memiliki status berkembang dan maju pastinya sudah melalui tahapan atau kriteria untuk menjadikan BUM Desa tersebut mendapatkan status berkembang ataupun maju.

Desa Betek merupakan desa yang berada di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan penduduk di Desa Betek yang bekerja pada sektor pertanian dan perindustrian sebagai karyawan pabrik. Pada sektor pertanian terdapat 50% masyarakat yang bekerja sebagai petani. Kemudian 30% masyarakat bekerja disektor industri sebagai pegawai pabrik. Dan 20% masyarakat Desa Betek bekerja disektor perdagangan. Adapun pabrik yang beroperasi di sekitar Desa Betek yakni pabrik sepatu, pabrik pupuk, pabrik karpet dan pabrik kayu.

Selain menjalani profesi di bidang pertanian ataupun karyawan pabrik, masyarakat Desa Betek juga ikut berpartisipasi dalam usaha BUM Desa. Yang awalnya 30% masyarakat bekerja sebagai karyawan pabrik, kemudian 20% masyarakat berpartisipasi dalam program BUM Desa Betek Bangkit Mandiri. Dalam pengelolaan yang melibatkan masyarakat dan juga untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam program BUM Desa merupakan cara yang dibuat sebagai upaya mewujudkan desa mandiri berdikari.

BUM Desa Betek Bangkit Mandiri merupakan BUM Desa yang ada di Desa Betek yang berdiri pada tahun 2015 dan beroperasi hingga saat ini dengan status BUM Desa berkembang. Unit usaha yang dikembangkan di BUM Desa ini adalah perdagangan, kantin pabrik, dan simpan pinjam. Namun dari ketiga unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa, pada unit perdagangan yang dapat

berkembang hingga saat ini. Pemilihan unit usaha dibidang perdagangan didasarkan dengan menggali potensi desa yang sesuai agar BUM Desa Betek Bangkit Mandiri dapat berkembang dengan pesat. Penyesuaian potensi desa memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa.

Dengan adanya pabrik yang terletak dikawasan Desa Betek menjadikan sasaran pengembangan unit usaha dagang untuk mensuplai kebutuhan makan karyawan yang bekerja di pabrik tersebut. Kemudian Desa Betek yang dilalui jalan lingkar provinsi atau *ring road*, untuk mengembangkan potensi yang ada maka sasaran pengembangannya dengan membangun kios- kios dagang (pujasera) untuk memasarkan produk- produk unggulan desa dengan dilengkapi taman bermain untuk kawasan rest area.

Kios- kios dagang atau Tempat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Betek Bangkit Mandiri (BBM) adalah unit usaha BUM Desa yang dijalankan di Desa Betek. Kebanyakan pujasera dikenal sebagai tempat makan yang terdiri dari kios- kios makanan dan minuman yang inovatif. Namun pada Pujasera Betek Bangkit Mandiri (BBM) ini tidak hanya menyediakan kios makanan ataupun minuman saja melainkan dengan adanya taman bermain yang dilengkapi dengan rumah bacaan. Taman ini dibangun secara mandiri yang bersumber dari swadaya masyarakat.

Tujuan dari di bangunnya taman ini tidak lain perwujudan dari aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya usaha lain yang di hasilkan dari BUM Desa. Taman BBM merupakan taman yang di kelolah oleh pemerintah Desa Betek dengan tujuan sebagai alternatif tempat hiburan bagi masyarakat lokal maupun warga yang

hanya singgah di rest area yang ada di taman tersebut yang awalnya adalah lahan yang kurang produktif, kemudian di manfaatkan pemerintah desa menjadi taman hiburan setelah di bangunnya *ring road* utara di Mojoagung.

Adapun pendapatan yang di hasilkan dari taman BBM ini sendiri masuk dalam pendapatan desa yang terpisah dari PADesa maupun dari ADD. Hal ini di karenakan BUM Desa ada perundang-undangnya sendiri dan ada badan hukumnya. Ada beberapa desa yang memasukkan pendapatan BUM Desa dalam PADesanya ada juga yang memisahkannya. Dalam hal ini pendapatan yang di hasilkan oleh taman BBM yang ada di Desa Betek dimasukkan ke dalam PADesannya sesuai pernyataan dari salah satu perangkat Desa Betek.

Sejalan dengan pernyataan yang di peroleh, bahwasanya PADesa yang semula dari tahun 2022 yakni sebesar Rp.1,821,131,769.03. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2023 yakni sebesar Rp.2,639,749,202.00 (terlampir dalam laporan keuangan Desa Betek). Dengan adanya peningkatan pendapatan dari BUM Desa yang di masukkan langsung dalam PADesa betek, maka desa betek sendiri bisa mengembangkan unit-unit usaha yang ada di pujasera taman BBM itu sendiri ataupun usaha lain yang bisa menunjang serta mendongkrak PADesanya.

Selain itu, Taman Betek Bangkit Mandiri juga bermanfaat untuk *rest area*, wahana bermain, ataupun wahana rekreasi dan taman edukasi. Taman edukasi yang dimaksud adalah adanya rumah bacaan yang disediakan oleh pemerintah desa untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan minat baca anak- anak dengan membaca buku bacaan yang telah disiapkan di rumah bacaan tersebut.

Untuk menyukseskan rumah bacaan yang dibangun di taman BBM tersebut, Polsek Mojoagung turut membantu memberikan sumbangan buku bacaan diikutip dari *Rednews*:

RedNews.co.id: Taman Baca Betek Bangkit Mandiri (BBM) menerima bahan bacaan dari Polsek Mojoagung Jombang. Tujuannya adalah untuk merangsang kecintaan membaca yang lebih besar di masyarakat. Kepala Taman Baca Betek Bangkit Mandiri (BBM) Heru Setiawan menerima langsung buku bacaan tersebut dari Kapolres Mojoagung Kopol Bambang Setiyobudi. Banyak buku yang disumbangkan memiliki tema yang berbeda. Dengan adanya buku yang diberikan diharapkan dapat bisa dibaca oleh pengunjung. Dengan begitu bisa meningkatkan minat baca anak-anak.

Sumber: <https://www.rednews.co.id/polsek-mojoagung-bantu-buku-bacaan-untuk-taman-bbm/> Diakses pada 1 september 2023

Tidak hanya itu untuk mempercantik taman Betek Bangkit Mandiri (BBM) Pemerintah Desa Betek melibatkan kelompok pecinta tanaman Desa Betek yang membantu menyediakan tanaman hias. Serta dalam perawatannya juga menjadi tanggung jawab kelompok pecinta tanaman tersebut, karena setiap tanaman memiliki cara perawatan yang berbeda- beda.

Dengan adanya Taman Betek Bangkit Mandiri (BBM) ini dapat meningkatkan pendapatan desa serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan menjual makanan, minuman serta jajanan di pujasera Betek Bangkit Mandiri (BBM). Meskipun jika dari segi keuangan unit usaha dagang ini masih dilakukan dengan manual dan terkadang tidak optimal yang dimana masyarakat hanya menyetorkan SHU kepada pengelola BUM Desa ditambah dengan SDM yang tidak memadai serta kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan BUM Desa.

Berdasarkan penelitian peninjauan yang dilakukan peneliti sebelumnya pada tanggal 29-30 September 2023 dengan ketua pengelola BUM Desa Betek, bahwasannya BUM Desa Betek Bangkit Mandiri mengalami perkembangan yang

pesat ditahun 2022 hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem pengelolaan ditahun 2015 hingga 2021 terdapat kendala yang menjadikan pengelolaan tidak teratur sehingga menyebabkan BUM Desa Betek Bangkit Mandiri tidak dapat berkembang, terutama pada pengelolaan usaha dan pengelolaan keuangan serta manajemen dan pengetahuan terkait pengelolaan yang kurang.

Berdasarkan penjelasan serta data di atas, peneliti memilih topik ini dengan menekankan pada strategi pengembangan. Strategi Pengembangan menggunakan analisis SWOT menurut Rangkuti dikutip oleh (Pradini, 2020) yakni *Strenghts, Weakness, Opportunity* dan *Threats*. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Strategi Pengembangan BUM Desa “Betek Bangkit Mandiri” di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang peneliti uraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah tentang strategi pengembangan BUM Desa Betek Bangkit Mandiri (BBM). Oleh karena itu, rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu Bagaimana strategi pengembangan BUM Desa Betek Bangkit Mandiri (BBM) di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu agar menjawab rumusan masalah yang sudah dituliskan diatas. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu Mendeskripsikan strategi pengembangan BUM Desa Betek Bangkit Mandiri (BBM) di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah referensi yang berguna untuk berbagai penelitian yang memiliki kesamaan di masa yang akan datang khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan pengetahuan dserta memahami terkait strategi pengembangan BUM Desa Betek Bangkit Mandiri (BBM) di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.